

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan
Penertiban Penyakit masyarakat (Studi di Kecamatan
Rambah)**

ABSTRAK

DONI PRATAMA

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kecamatan Rambah merupakan salah satu dari 16 kecamatan di kabupaten rokan hulu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban maka pemerintah kabupaten rokan hulu mengeluarkan melahirkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dimana pada pasal 3 dan 4 diatur setiap orang dilarang mengedarkan minuman yang dapat memabukan dan tindakan prostitusi namun dengan adanya perda ini masih ada juga terjadi dikecamatan Rambah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban di kecamatan Rambah, Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari pelaksanaan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif, sampel dalam penelitian berjumlah 79 orang yang terdiri dari camat Rambah, kepala satpol PP, kasi Operasional satpol PP kabupaten rokan hulu, Unit pelaksana satpol PP kecamatan Rambah (KK), teknik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan observasi langsung kelapangan dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan peraturan kabupaten rokan hulu adalah nomor 1 tahun 2009 tentang larangan dan penertiban penyakit masyarakat (studi kecamatan Rambah) berada dalam kategori “Cukup baik”. Akan tetapi masih ada hambatan yaitu : kurang sosialisasinya peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat, sanksi yang diberikan kepada pelaku pekat belum membuahkan efek jera, kurangnya koordinasi antara satpol PP dengan pihak dinas sosial dan kecamatan lemahnya komitmen dari setiap pihak membuat pekat susah untuk diatasi.

Kata kunci: Evaluasi, Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat, Kecamatan Rambah

**Evaluation of the Implementation of Regional Regulation of Rokan
Hulu District Number 1 Year 2009 on the Prohibition and
Control of Public Disease (Study in districts Rambah)**

ABSTRACT

DONI PRATAMA

Law number 23 Year 2014 on regional government, obligatory affairs which become the authority of local government for districts / municipalities is a district-scale affairs which one of them is the implementation of public order and public order, Rambah sub-district is one of 16 districts dikabupaten rokan upstream to maintain peace and order then the government of Rokan upstream regency issued the regulation of the district of rokan hulu number 1 of 2009 on the prohibition and control of public diseases where in chapters 3 and 4 arranged every person is prohibited to circulate drinks that can bombing and acts of prostitution but with the local regulations this still exists also happened in the district of Rambah. The formulation of the problem in the study is how the Evaluation of the implementation of the regulation of the district of rokan hulu number 1 of 2009 on the prohibition and controlling in the subdistrict Rambah, While the purpose of this study is to know from the implementation of perebaing district rokan hulu number 1 of 2009 on the prohibition and control of public diseases This research use quantitative with type of descriptive survey research, sample in research amounted to 79 people consisting of sub district Rambah, head of Satpol PP, Head of Satpol PP unit of rokan hulu regency, Unit of Satpol PP subdistrict of Rambah (KK), data collecting technique through questionnaire, interview and direct observation of spaciousness and documentation. The conclusion of this research is that the implementation of regulation of rokan hulu regency is number 1 year 2009 about prohibition and control of public disease (study of sub district of Rambah) is in the category of "good enough". However, there are still obstacles, namely: the lack of socialization of regulation of the district of rokan hulu number 1 of 2009 on the prohibition and control of public diseases, the sanctions given to the concentrated perpetrators have not produced a deterrent effect, the lack of coordination between the PP Satpol with the social agencies and kecamatan each party makes the concentrated hard to overcome.

Keyword: Evaluation, Prohibition and Control of Community Disease, District Rambah